

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG

Firman Bayu Aji¹

Nugroho SBM

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
(firmanbayuaji@students.undip.ac.id)

Abstract

Taxes are a source of regional income. Semarang City in terms of PAD has tax revenues that are still volatile. Judging from the existing tax potential, the City of Semarang has quite good potential but has not been explored effectively and efficiently. This study aims to analyze the factors that affect Semarang City local taxes with the independent variables of PDRB, inflation, number of industries and population density.

The data used in this research is secondary data. The analysis model used is multiple linear regression analysis. Multiple linear regression analysis using the classical assumption test includes normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, and hypothesis testing through the F test, t test and coefficient of determination (R²).

The results of the analysis of this study indicate that the GRDP and inflation variables have a significant positive effect, while the number of industries and population density variables have a positive and insignificant effect. The analysis of the F test results shows that the variables of GRDP, inflation, population density and the number of visitors to tourism objects simultaneously influence local tax revenues. The Adjusted R square value of 87 percent of the independent variable can affect government revenue, while 13 percent of local tax revenue is influenced by variables other than the variables used in the study.

Keywords: Local Taxes, GRDP, Inflation, Number of Industries, Population Density.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan pendapatan negara dalam negeri yang tertuang dalam postur APBN ialah berasal dari penerimaan perpajakan. Pemungutan pajak di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Menurut Waluyo (2013) pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang untuk

¹ *Corresponding Author*

membayar sejumlah uang untuk kas negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Reformasi perpajakan adalah membenahan terkait administrasi sistem perpajakan, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri mempunyai peran yang sangat penting, salah satunya adalah perbaharuan sistem yang dianut di tiap tahunnya. Adanya reformasi sistem perpajakan selain untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, reformasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Berikut Tabel 1. Untuk menggambarkan Kondisi Pajak Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kontribusi subsektor terbesar pada PDRB Jawa Barat pada tahun 2017 yang paling besar adalah industri pengolahan yaitu sebesar 43,07 persen. Kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2015- 2019
(dalam milliar Rupiah)

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
2015	1.240.419	-
2016	1.284.970	3,6 persen
2017	1.343.530	4,5 persen
2018	1.548.485	15,3 persen
2019	1.643.084	6,1 persen

Sumber : BPS , 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, Penerimaan Pajak di Indonesia Pada Tahun 2015-2019 terus meningkat. namun jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,2 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peningkatan pajak sebesar 11 persen.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi daerah diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dalam penetapan tarif. Pada Tabel 1.2 di bawah dapat dilihat perkembangan Penerimaan daerah dan Pajak Daerah dalam kurun waktu tiga tahun di 5 Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Pada 5 Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 (dalam jutaan rupiah)

No	Kota	Tahun			Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2017	2018
1.	Magelang	186,677	233,567	249,873	25,12	6,98
2.	Tegal	287,342	306,830	275,021	6,78	-10,37
3.	Semarang	1,377,270	1,791,886	1,821,274	30,10	1,64
4.	Salatiga	203,768	220,243	208,926	8,08	-0,05
5.	Pekalongan	179,216	190,528	215,689	6,31	13,20

Sumber :BPS , 2020 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 2, Kota Semarang termasuk dalam Daerah dengan penerimaan daerah paling tinggi dibanding kota lain dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2018. Penerimaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan namun dilihat dari presentase pertumbuhan pada Tabel tersebut Kota Semarang mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 28,46 persen.

Untuk mengetahui penerimaan pajak daerah apakah sudah memenuhi target dapat dilihat pada Tabel 2 yang memperlihatkan realisasi dan rasio pajak daerah di Kota Semarang dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak maka masyarakat berkewajiban dalam membayar pungutan pajak karena dapat membantu proses pembangunan perekonomian daerah. Salah satu syarat pemungutan pajak di Indonesia yaitu “Syarat Yuridis” yang diatur dalam Undang-undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

Tabel 3
Tax Ratio Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Semarang
Pada Tahun 2013- 2018 (dalam jutaan rupiah)

No	Kota	Tax Ratio				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Magelang	5,1	4,8	4,9	5,6	5,9
2	Tegal	5,2	5,4	5,7	6,9	7,9
3	Semarang	7,7	7,4	8,7	9,9	10,1
4	Salatiga	4,8	4,8	5,9	5,7	6,03
5	Pekalongan	6,1	7,8	8,3	9,1	9,6

Sumber : DPPKAD dan BPS , 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, Pertumbuhan Kota Semarang dalam kurun waktu enam tahun mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2015 pertumbuhan pajak daerah sangat rendah di banding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,2 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan pajak daerah yang langsung meningkat sebesar 20,19 persen. Tahun 2016 sampai 2018 terjadi penurunan kembali walaupun nilai pajak daerah yang diterima meningkat tetapi presentase pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan. Jika dilihat perbandingan dengan kota lain di Jawa Tengah tax ratio Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir merupakan yang paling tinggi diikuti dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi tanggung jawab setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

Tabel 4
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Tahun 2014-2018 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba Usaha Lain	PAD yang lain lain yang sah
2014	791,509,586,089	110,488,302,793	8,036,099,560	228,330,462,551
2015	816,208,853,780	87,967,203,810	10,530,576,700	142,973,377,180
2016	1,006,487,472,780	122,893,496,520	52,309,979,750	155,579,367,990
2017	1,231,515,123,563	85,744,858,357	28,491,561,139	446,134,835,615
2018	1,331,817,746,450	107,791,109,630	42,552,117,491	339,113,129,679

Sumber : DPPKAD Kota Semarang

Penerimaan pajak daerah lebih tinggi dibanding sumber penerimaan daerah lainnya di Kota Semarang selama tahun 2013-2018. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak maka masyarakat berkewajiban dalam membayar pungutan pajak karena dapat membantu proses pembangunan perekonomian daerah. Salah satu syarat pemungutan pajak di Indonesia yaitu “*Syarat Yuridis*” yang diatur dalam Undang-undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

Kota Semarang memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi sumber daya pada wilayah tersebut. Beberapa argumentasi mengenai pertumbuhan penduduk yang cepat bukan masalah pembangunan serius (Todaro, 2006). Beberapa argumentasi meliputi sebagai berikut:

1. Akan perlahan-lahan menurun setelah ekonomi maju.
2. Alokasi sumber-sumber alam yang tidak merata daripada pertumbuhan penduduk. Kurang dari 30 persen penduduk yang tinggal, namun mereka mengkonsumsi lebih dari 80 persen sumber alam. Pengendalian sumber alam lebih penting dibanding pengendalian penduduk.
3. Masalah pertumbuhan penduduk adalah isu atau berita bohong yang yang digunakan oleh negara-negara maju untuk kepentingan mereka sendiri.
4. Distribusi penduduk merupakan masalah yang lebih gawat dibanding jumlah penduduk keseluruhan.
5. Pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Pemerintah Kota Semarang mendefinisikan jenis pajak daerah yang dipungut yaitu antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak lainnya. Peraturan Pemerintah dengan pemilihan jenis pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan kewenangan daerah otonom Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, kewenangan Pajak Daerah menjadi tanggungjawab daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Pajak Daerah.

Penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tax ratio pajak daerah. Angka tax ratio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu daerah. Tinggi dan rendahnya tax ratio pajak dapat mempengaruhi tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat hasil pajak terutang yang diperoleh dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Dari beberapa penjelasan diatas, penelitian ini mencoba meneliti pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Penelitian Arianto (2014) tentang pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah serta penelitian Artha (2016) tentang pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah memiliki hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap Pajak Daerah. Hasil berbeda yang ditunjukkan oleh penelitian Ulan (2014) tentang pengaruh PDRB menunjukkan hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pajak Daerah.

Penelitian Nastiti (2015), Arianto (2014), dan Artha (2016) tentang pengaruh Jumlah Penduduk menunjukkan hasil bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Berbeda pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulan (2014) dan Putri (2013) tentang pengaruh Jumlah Penduduk yang berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah.

Penelitian Putri (2013) dan Nastiti (2015) tentang Inflasi menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pajak daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) dan Artha (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yakni inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pajak daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat hasil pajak terutang yang diperoleh dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Dari beberapa penjelasan diatas, penelitian ini mencoba meneliti pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan Pajak daerah di Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan dalam daerah lebih memfokuskan peningkatan yang terjadi pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada pertumbuhan angka PDRB. Proses peningkatan yang terjadi pada PDRB merupakan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai PDRB di suatu daerah, maka potensi sumber penerimaan pemerintah daerah akan semakin besar (Simanjuntak, 2001). Menurut Adisasmita (2010) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut alasan menurut Adisasmita (2010) yang mendasari pemilihan PDRB dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu:

- PDRB merupakan total nilai yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian daerah. Peningkatan jasa kepada faktor produksi dalam aktivitas produksi merupakan cerminan peningkatan pada PDRB.
- PDRB dihitung berdasarkan konsep arus barang, artinya perhitungan atas nilai produk yang dihasilkan pada periode tertentu.

- Batas wilayah perhitungan PDRB, artinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Meningkatnya PDRB maka meningkat pula produk yang dihasilkan oleh daerah tersebut dalam periode tertentu yang mampu mendorong perekonomian daerah tersebut. Tingginya penerimaan ekonomi daerah yang berkaitan dengan tingkat pemungutan pajak yang tertib dan memungkinkan untuk menargetkan penarikan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk sering kali dijadikan salah satu faktor yang positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat jumlah penduduk akan mempengaruhi kegiatan produksi yang lebih besar dan akan berdampak pada hasil produksi yang meningkat. Jumlah konsumsi penduduk yang akan menimbulkan permintaan agregat. Adanya permintaan agregat yang meningkat akan memicu usaha-usaha yang produktif dan perekonomian secara keseluruhan. Para ahli ekonomi dan ahli sosiologi dalam Adioetomo dan Samosir (2010) membahas antara kepadatan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya kepadatan penduduk yang besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika kepadatan penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebuah proporsi yang ideal jika antara luas tanah dan kepadatan penduduk memiliki keseimbangan satu sama lain. Plato dan Aristoteles menganjurkan kepadatan penduduk yang ideal dalam sebuah kota. Apabila sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat maka solusinya diperlukan pembatasan kelahiran. Sebaliknya apabila jika terjadi kekurangan pada kepadatan penduduk, maka diperlukan intensif (pendorong) untuk menambah kelahiran.

Penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang ada, semakin tinggi kepadatan penduduk maka tingkat lahan atas bangunan semakin meningkat, dan semakin bertambahnya konsumsi atas air yang digunakan. Bertambahnya kepadatan penduduk dapat menyebabkan juga tingkat konsumsi yang dibutuhkan. Hal ini dapat mempengaruhi pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain.

Inflasi merupakan suatu proses yang terjadi pada harga-harga barang yang berlaku dalam perekonomian dan mengalami peningkatan secara terus menerus (Sukirno, 2002). Teori tersebut menyatakan bahwa inflasi merupakan kenaikan yang berlangsung secara terus menerus dalam rata-rata tingkat harga barang. Kenaikan harga barang yang terjadi secara terus menerus tersebut yang berarti seluruh unit ekonomi (konsumen ataupun produsen) akan membeli jumlah barang yang cenderung lebih sedikit dengan pengeluaran total uang yang sama. Jika terjadi peningkatan pada inflasi maka dapat berpengaruh terhadap pajak daerah yang ada. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya tingkat inflasi. Jika inflasi memiliki pengaruh yang positif atau rendahnya inflasi artinya dapat menjadi dorongan dalam perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, jika terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) maka keadaan perekonomian menjadi kacau dan tingkat perekonomian menjadi rendah. Pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh yang

memiliki penerimaan pendapatan akan mengurangi jumlah konsumsi akibat tingkat harga yang tinggi.

Peningkatan pada inflasi akan berdampak pada pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hiburan. Peningkatan yang terjadi pada harga kebutuhan pokok dapat mengurangi atau membatasi jumlah bahan pokok seperti bahan makanan yang digunakan dalam restoran, yang mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak restoran. Adapun inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2014) menunjukkan bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh pada penerimaan pajak daerah.

Menurut Tarigan (2005), Perusahaan besar akan meramalkan perubahan yang akan terjadi di daerah perusahaan/industry beroperasi, sehingga industry akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka. Ketika semua faktor penentuan lokasi telah terpenuhi maka industri akan melakukan kegiatan industry di daerah tersebut. Menurut Nurmayasari (2010) menyatakan jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Penelitian ini menggunakan data panel data runtun waktu (time series) .Data time series yang digunakan yaitu tahun 2000-2019 di Kota Semarang Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik Kota Semarang, DPPKAD Kota Semarang serta website Badan Pusat Statistik Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat (dependen) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas (independen) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain.

Metode Analisis

Besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*Independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil. Dengan metode ini diyakini memiliki sifat-sifat yang dapat diunggulkan secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya

Model untuk analisis regresi dengan menggunakan pendekatan OLS adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{LnPDRB} + \beta_2 \text{LnINF} + \beta_3 \text{LnJI} + \beta_4 \text{LnKP} + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Daerah (jutaan rupiah)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

INF	= Inflasi (persen)
KP	= Kepadatan Penduduk (satuan jiwa per KM ²)
PDRB	= PDRB (jutaan rupiah)
JI	= Jumlah Industri (satuan unit pertahun)
e	= error terms (kesalahan pengganggu)

Pengujian secara statistika juga dilakuka yang meliputi uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikansi parameter individu (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik

Berdasarkan identifikasi model yang sudah bebas dari masalah asumsi klasik maka diperoleh hasil pengujian model dan pengujian hpotesis sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Estimasi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	T-statistics	Probabilitas
C	3.622393	0.718779	0.0000
PDRB	7.651584	4.445353	0.0002
INF	4.786019	0.230706	0.0025
JI	0.457895	-0.215802	0.8309
KP	5.858903	-0.689735	0.4967

R-squared = 0.873518
Adjusted R-squared=0.853281
F-statistic= 43.16427
Prob(F-statistic)= 0.000000

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat dan mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai R^2 kurang dari 50 persen maka dapat dikatakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, begitu sebaliknya. Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 4.6, nilai R^2 untuk model penelitian ini adalah sebesar 0, 87 maka nilai koefisien determinasi dapat ditetapkan sebesar 82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Industri dan Kepadatan Penduduk terhadap pajak daerah Kota Semarang 87 persen, sedangkan 13 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji F

Hasil estimasi diketahui nilai F sebesar 43.16427 dan nilai Prob (F-Statistic) pada model memiliki nilai 0.00 yang lebih kecil dibandingkan taraf nyata α sebesar 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Industri

dan Kepadatan Penduduk berpengaruh bersama-sama (simultan) terhadap Pajak Daerah Kota Semarang

Uji t

Uji-t dilakukan untuk melihat masing-masing variabel bebas secara statistik berpengaruh nyata terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Uji tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai t-statistic dari masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 5$ persen. Variabel independen PDRB dan inflasi memiliki nilai probabilitas lebih kecil daripada taraf nyata $\alpha = 5$ persen. Hal ini berarti variabel-variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Variabel Jumlah Industri dan Kepadatan Penduduk memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5$ persen sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang.

Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah Kota Semarang

Berdasarkan hasil uji regresi nilai PDRB di Kota Semarang dengan nilai koefisien sebesar 7.6515 yang artinya setiap 1 persen kenaikan pada PDRB akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 7.6515 persen. Besaran nilai hasil uji regresi PDRB menunjukkan bahwa sesuai dengan hipotesis 1 pada penelitian. Adanya hubungan antara variabel PDRB terhadap penerimaan pajak dalam penelitian yaitu semakin besar PDRB yang ada dalam suatu daerah akan meningkatkan berbagai sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut sehingga kemampuan sektor industri akan semakin baik sehingga potensi pajak yang dapat diterima Pemerintah Daerah akan semakin besar.

Naiknya pendapatan yang dihasilkan masyarakat, maka tingkat konsumsi akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Nurrohman, 2010). Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (ability to pay) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014), Nastiti (2015), Artha (2016) yang menyatakan bahwa variabel PDRB secara positif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien inflasi sebesar 4.786019 artinya setiap 1 persen peningkatan inflasi akan menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah sebesar 4.786 persen. Hasil pengujian pada nilai inflasi menunjukkan bahwa sesuai dengan hipotesis 2 pada penelitian. Hasil penelitian didapat bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah artinya apabila inflasi meningkat penerimaan pajak daerah juga akan meningkat begitu pula sebaliknya ceteris paribus. Menurut teori inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh memengaruhi.

Menurut teori inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan

peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi.

Temuan Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) dan Nastiti (2015) yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014), Purwanti dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jumlah industri sebesar 0.457895 artinya setiap 1 persen peningkatan jumlah Industri akan menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah sebesar 0.45 persen. Jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa pengaruh jumlah industri terhadap pajak daerah tidak berpengaruh signifikan, artinya adanya pembangunan industri di Kota Semarang diperlukan peningkatan akan memacu dan mengangkat pembangunan pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa, misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Tidak signifikannya terjadi dikarenakan penambahan jumlah industri di Kota Semarang tersebut merupakan meningkatnya usaha mikro dan tidak terkena pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tamara (2009) menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Pajak Daerah

Hasil pengujian diperoleh bahwa kepadatan penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 5.858903 artinya bahwa setiap 1 persen peningkatan pada kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah sebesar 5.858903 persen. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis 4 pada penelitian. Adanya hubungan antara variabel kepadatan penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu karena kepadatan penduduk berhubungan dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah dengan luas wilayah yang tetap. Kepadatan penduduk yang semakin tinggi maka akan menyebabkan Jumlah wajib pajak pada Kota Semarang Meningkat. Namun pada penelitian ini variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan karena bertambahnya jumlah penduduk belum mampu meningkatkan pajak daerah Kota Semarang. Dengan kata lain penambahan penduduk adalah penambahan penduduk yang belum memasuki usia produktif atau belum terkena pajak,

Kondisi ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014), Purwanti dan Dewi (2014), Nastiti (2015) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Nilai probabilitas variabel kepadatan penduduk sebesar 0.0953 lebih besar dari 0,05. Hasil dari

penelitian ini mendukung penelitian dari Putri (2013) dan Ulan (2014) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan analisis maka dapat ditarik kesimpulan Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Variabel Jumlah Industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Industri dan Kepadatan Penduduk berpengaruh secara bersama sama (simultan) terhadap Pajak Daerah Kota Semarang.

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah dapat melalui pendapatan di sektor unggulan ialah PDRB di Kota Semarang. Diharapkan pemerintah Kota Semarang lebih insentif dalam mengembangkan kebijakan menurut perundang-undang yang berlaku di sektor unggulan guna meningkatkan penerimaan Pajak daerah dan dilakukan dengan bijaksana. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas variabel-variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah seperti jumlah pelanggan listrik, jumlah kendaraan bermotor, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M dan Samosir, O.B. (2010). *Dasar-dasar Demografi edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arianto, P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 1.hal 1-13.
- Artha, Z. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember*. Skripsi Universitas Jember.
- BPS. (2020). *Data Inflasi, jumlah Industri, dan Kepadatan Penduduk 1990-2019*, Kota Semarang.
- DPPKAD. (2020). *Data Target Pajak Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah 1990-2019*, Kota Semarang.
- Haniz, N.F dan Sasana, H. (2014), Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal, *Diponegoro Journal of Economics* Vol. 3 No. 1, 1-13.
- Nastiti, R. (2015). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* ,Vol.4, No 1: Pages 1-19.
- Nurmayasari, D (2010). *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurrohman, A. (2010). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*, Skripsi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Purwanti, D. N dan Dewi, M. R. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terwoke hadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2, No 3, 1-12.
- Putri, P. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak *Journal of Economics and Policy*, Vol. 6(a), No 2, 103-213.
- Simanjuntak, P. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Sukirno, S. (2002). *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Tamara, A. (2009). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1998-2008). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, November, 151-172.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9*. Jakarta : Erlangga.
- Ulan, T. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 1990-2012*. Skripsi Universitas Muhamadiya Malang.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia 1* (ed. ke-11) Jakarta : Salemba Empat.